

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Penentuan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Secara umum, kondisi harga berbagai komoditas pangan dan kebutuhan pokok selama periode Januari hingga Maret 2026 menunjukkan variasi fluktuasi harga bulanan di seluruh jenis barang. Fluktuasi harga berbagai komoditas dipengaruhi oleh moment tahun baru, bulan ramadan, idul fitri, serta faktor kondisi stabilitas politik dan ekonomi global.

Tingkat inflasi Kota Pekalongan mengacu pada Kota Tegal sebagai kota IHK. Pada Januari 2026 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) Kota Tegal sebesar 3,08 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,34. Inflasi y-on-y tertinggi di Provinsi Jawa Tengah terjadi pada Kota Semarang sebesar 3,29 persen. Sementara inflasi y-on-y terendah terjadi di Kab. Wonogiri sebesar 2,30 persen.

Pada Februari 2026 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) Kota Tegal sebesar 4,97 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,29. Inflasi y-on-y tertinggi di Provinsi Jawa Tengah terjadi pada Kota Tegal sebesar 4,97 persen. Sementara inflasi y-on-y terendah terjadi di Kab. Wonosobo sebesar 3,94 persen.

Pada Maret 2026 terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) Kota Tegal sebesar 3,99 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89. Inflasi y-on-y tertinggi di Provinsi Jawa Tengah terjadi pada Kota Tegal sebesar 3,99 persen. Sementara inflasi y-on-y terendah terjadi di Kab. Wonosobo sebesar 3,15 persen.

Berikut ini grafik perkembangan harga kebutuhan pokok di Kota Pekalongan pada Triwulan I 2026.

4. Protein Lain & Produk Laut

- Ikan Laut Kembang: Harga cukup stabil di kisaran Rp35.000.
- Udang Basah (Sedang): Menempati posisi harga tinggi setelah daging, stabil di angka sekitar Rp65.000 sepanjang triwulan.
- Tempe: Harga sangat stabil dan rendah, berada di kisaran Rp10.000.
- Susu Bubuk (Dancow) & Susu Kental (Indomilk): Keduanya menunjukkan harga yang konsisten tanpa perubahan mendadak.

5. Barang Kebutuhan Lainnya

- Minyak Goreng Kemasan: Stabil di kisaran Rp18.000 - Rp20.000.
- Garam Bata & Mie Instant: Merupakan komoditas termurah dalam grafik, bertahan di bawah Rp10.000.
- Kacang Hijau & Pisang Ambon: Menunjukkan pergerakan harga yang stabil di level menengah (Rp15.000 - Rp25.000).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang masih dihadapi oleh TPID Kota Pekalongan dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K hingga periode Triwulan I Tahun 2026 ini, antara lain:

1. Terbatasnya lahan pertanian;
2. Fluktuasi harga komoditas pangan, seperti cabe rawit, cabe merah, dan bawang merah, yang tidak terkait dengan jumlah ketersediaan (supply) maupun tingkat kebutuhan/permintaan (demand);
3. Kota Pekalongan bukan merupakan daerah pemasok sehingga harga ditentukan dari daerah pemasok atau daerah penghasil;
4. Cuaca dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi, juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan stok yang bermuara pada fluktuasi harga pada beberapa komoditas pangan di Kota Pekalongan;
5. Kondisi stabilitas ekonomi dan politik global yang mempengaruhi harga komoditas;

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Program Kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Kota Pekalongan pada Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut :

1. High Level Meeting (HLM) dalam rangka persiapan menghadapi bulan suci ramadan yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 9 Februari 2026

Jam : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Tiga Negeri Setda Kota Pekalongan

Hasil :

1. Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Pekalongan, H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M. sekaligus memberikan arahan mengenai persiapan menghadapi Bulan Suci Ramadan dan Idulfitri 2026. Rapat dipimpin oleh Asisten II Sekda, serta dihadiri oleh kegiatan diikuti oleh

instansi-instansi yang menjadi bagian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pekalongan (TPID) dan para stakeholder terkait. Pada kegiatan ini dilakukan pemaparan tentang kesiapan menghadapi Bulan Suci Ramadan dan Idulfitri 2026 oleh Dinperpa dan Perwakilan Bank Indonesia

2. Arahan Walikota Pekalongan terkait Pengendalian Inflasi dalam menghadapi Bulan Suci Ramadan dan Idulfitri 2026, diantaranya:

- a. Tugas dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk dioptimalkan, terutama dalam pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pengaturan dan pengawasan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, agar melakukan program untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di masyarakat.
- c. Kenaikan harga menjelang Ramadan hampir tidak bisa dihindari, karena secara historis maupun secara global sudah umum terjadi, sehingga langkah yang perlu difokuskan adalah memastikan ketersediaan barang sehingga tidak terjadi kelangkaan di masyarakat.
- d. Memastikan kelancaran distribusi dengan memperhatikan kelayakan fasilitas umum dan sarana prasarana penunjang distribusi barang.
- e. Melakukan penataan arus lalu lintas terutama pada masa-masa keramaian dan Bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri

3. Rencana aksi untuk Variabel Ketercukupan pasokan :

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM serta Dinas Pertanian dan Pangan untuk melakukan monitoring berbasis data untuk menentukan langkah intervensi, memperluas pengecekan stok hingga ke daerah produsen, serta menyusun skenario normal dan ekstrem (dapat berkoordinasi dengan BULOG) serta mempertimbangkan dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap keseimbangan harga di tingkat produsen maupun konsumen.

4. Rencana aksi untuk Variabel Keterjangkauan Harga

Menyusun rencana stabilisasi harga yang menyeimbangkan margin keuntungan di lini produsen dan distributor agar harga tetap kompetitif serta terjangkau bagi konsumen akhir.

5. Rencana aksi untuk Variabel Kelancaran Distribusi

Dinas Perhubungan agar memastikan integritas jalur logistik dan DPUPR agar melakukan percepatan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak guna mencegah keterlambatan pengiriman serta penurunan kualitas barang di perjalanan.

6. Rencana aksi untuk Variabel Komunikasi Efektif

Dinas Kominfo agar mengoptimalkan pemanfaatan berbagai media publikasi untuk membantu mensosialisasikan ketersediaan stok guna meredam fenomena panic buying di masyarakat.

2. High Level Meeting (HLM) dalam rangka persiapan menghadapi bulan Hari Raya Idulfitri yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 10 Maret 2026

Jam : 08.30 WIB - selesai

Tempat : Aula BPKAD Kota Pekalongan

Hasil :

1. Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Pekalongan, H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M. sekaligus memberikan arahan mengenai persiapan menghadapi Hari Raya Idulfitri 1447 H / 2026 M. Rapat dipimpin oleh Asisten II Sekda, serta dihadiri oleh kegiatan diikuti oleh instansi-instansi yang menjadi bagian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pekalongan (TPID) dan para stakeholder terkait. Pada kegiatan ini dilakukan pemaparan tentang kesiapan menghadarpri Hari Raya Idulfitri 1447 H / 2026 M oleh Dishub, Dindagkop UKM, dan Dinperpa.

2. Arahan Walikota Pekalongan terkait Pengendalian Inflasi dalam menghadapi Persiapan Hari Raya Idulfitri 1447 H / 2026 M, diantaranya:
 - a. Untuk pengendalian, pengawasan harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat:
 - 1) Tugas dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk dioptimalkan, terutama dalam pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
 - 2) Perangkat Daerah yang membidangi pengaturan dan pengawasan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, untuk berkoordinasi dengan Bulog dalam pemantauan stock bahan kebutuhan pokok masyarakat
 - 3) Agar berkoordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan dan stok energi (BBM, BBG, LPG, listrik), dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan dan kelangkaan.
 - 4) Seluruh jajaran aparat penegak hukum, untuk bersinergi dalam rangka melakukan langkah- langkah korektif, atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, maupun penimbunan termasuk pengawasan penyaluran/distribusi BBM dan LPG,
 - b. Untuk meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat umum langkah yang harus dilaksanakan:
 - 1) Kepala Dinas Perhubungan membentuk posko terpadu Hari Raya Idulfitri 1447 H / 2026 M.
 - 2) Kepala DPUPR untuk mengoptimalisasi kemandirian infrastruktur jalan serta fasilitas pendukung pada titik strategis lalu lintas.
 - 3) Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan fasilitas Kesehatan di posko terpadu
 - 4) Kepala Dinas perhubungan untuk memastikan kesiapan sarana transportasi untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat dan logistik.
 - c. Dalam bidang pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan Kepala Dinas perhubungan agar:
 - 1) Menempatkan petugas pada lokasi kepadatan lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan dan kecelakaan lalulintas,
 - 2) Pengaturan lalu lintas di perlintasan sebidang yang tidak berpalang pintu dan rawan terjadi kecelakaan,
 - 3) Memastikan kelancaran mobilisasi angkutan logistik, dan
 - 4) Antisipasi gangguan pada daerah rawan bencana.
 - d. Untuk memastikan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat:
 - 1) Seluruh jajaran Satpol P3KP untuk senantiasa bersiap siaga dalam mencegah dan mengantisipasi aktifitas publik yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - 2) Seluruh jajaran TNI dan POLRI untuk berkoordinasi secara intens dan kolaboratif, dalam menjamin keamanan.
 - e. Seluruh stakeholder terkait, perwakilan Pertamina dan Bulog Wiradesa untuk bersama-sama dengan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat selama momentum Hari Raya Idulfitri 1447 H / 2026 M
3. Kepala Dinas Perhubungan, M. Restu Hidayat, S.SiT., M.T., menjelaskan kesiapan pengamanan arus lalu lintas untuk momentum Hari Raya Idulfitri 1447 H / 2026 M.
 - a. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan telah mengantisipasi permasalahan umum di Kota Pekalongan dan telah menyusun jadwal kegiatan untuk monitoring selama periode Idulfitri.
 - b. Telah dilakukan pengecekan dan penyiapan angkutan umum, prasarana lalu lintas, ATCS, dan penerangan jalan umum. Akan dilakukan juga pembatasan kendaraan sumbu 3 untuk tidak memasuki kota.
 - c. Untuk persiapan menghadapi momentum idulfitri, Dishub akan mengadakan pos-pos di titik-titik strategis untuk menjaga kelancaran lalu lintas.
 - d. Telah disiapkan juga rencana jalur alternatif apabil terjadi kemacetan di ruas-ruas jalan dalam kota.

4. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pekalongan menjelaskan beberapa hal terkait kondisi harga komoditas di Kota Pekalongan menjelang Nataru.
 - a. Menjelang Idul Fitri 2026 diperkirakan ada potensi kenaikan permintaan barang kebutuhan pokok yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap harga.
 - b. Perlu dilakukan upayaantisipasi dini berupa koordinasi yang melibatkan pemerintah pusat/instansi vertikal, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha agar bersinergi dalam mengambil langkah nyata bila muncul masalah.
 - c. Komoditas yang mengalami kenaikan harga Menjelang Idul Fitri 2026 antara lain cabai merah besar, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras dan daging ayam ras
 - d. Sesuai alokasi LPG (3kg) di Kota Pekalongan pada Tahun 2026 sebanyak 13.659 MT (4.553.000) tabung dan alokasi yang sudah di salurkan 801.360 tabung, Kebutuhan LPG 3 kg menjelang Idul Fitri dapat tercukupi.
 - e. Tim gabungan pemantauan bapokting dan pengawasan barang beredar dan menjelang Idul Fitri tahun 2026 selama 2 hari (tanggal 11-12 Februari 2026) melakukan pemantauan dan pengawasan ke 3 Pasar Rakyat, 4 Pasar Modern, 8 Toko Retail Modern, 1 Distributor beras, 1 Distributor Telur, 2 Toko Beras, 1 Toko Oleh-oleh, 1 SPBU, 1 Agen Gas LPG 3 Kg, 1 Pangkalan Gas LPG 3 Kg dan 1 Kios Kedelai. Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa harga barang kepokmas dan banting di Kota Pekalongan relatif stabil, rantai pasok lancar dan persediaan cukup menjelang Idul Fitri 2026
5. Dinas Pertanian dan Pangan menyampaikan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk momentum Hari Raya Idulfitri 1447 H/ 2026 M :
 - a. Kebutuhan Pangan pada Hari Raya Idul Fitri di proyeksi naik, terutama komoditas Beras, Daging Ayam, Telur, dan Daging sapi. Kebutuhan akan beras naik 126 ton, selain untuk konsumsi pada bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri kebutuhan beras juga untuk Zakat Fitrah. Namun saat ini sedang masa Panen Raya sehingga untuk memenuhi kebutuhan beras masih aman.
 - b. Hasil pantauan pangan strategis pada 1 Maret 2026 - 9 Maret 2026 harga cenderung stabil, namun ada komoditas masih berada diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) yaitu Beras Medium dan Bawang Merah. Sedangkan untuk komoditas Cabai Rawit Merah pada bulan Maret mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan berada diatas Harga Acuan Penjualan (HAP).
 - c. Strategi stabilisasi pasokan dan harga pangan yang telah dilakukan antara lain; Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan, Fasilitasi Distribusi Pangan, Kios Pangan Murah, Gerakan Pangan Murah, Koordinasi dan Evaluasi.

3. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Usulan Pemkot Pekalongan melalui Dinas Pertanian dan Pangan terkait bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk korban banjir ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) diakomodir 100 persen. Atas usulan dimaksud, Perum Bulog Kantor Cabang Tegal menyalurkan bantuan CBP sebanyak 13.195 kilogram atau 13,195 ton untuk mendukung penanganan bencana banjir di Kota Pekalongan.

Penyaluran bantuan CBP tersebut diserahkan Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Tegal, Agung Rochman kepada Walikota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, di Kantor BPBD Kota Pekalongan, Jumat 30 Januari 2026. Walikota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid menyampaikan bahwa seluruh pengajuan bantuan CBP sebesar 13,195 ton telah dipenuhi. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu, mengingat status tanggap darurat banjir di Kota Pekalongan diperpanjang hingga 13 Februari 2026 akibat cuaca ekstrem yang masih berlangsung.

Status tanggap darurat banjir sebelumnya ditetapkan selama 14 hari, mulai 17 hingga 30 Januari 2026, dan diperpanjang seiring kondisi cuaca yang belum membaik. Sebanyak kurang lebih 500 warga terdampak banjir di Kota Pekalongan saat ini juga masih berada di sejumlah posko pengungsian.

4. Sidak Pasar bersama Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional

Kunjungan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional dalam Pengawasan Harga, Keamanan dan Mutu Pangan yang berlangsung di Pasar Grogolan dan Toserba Yogya Mall, Kota Pekalongan. Dalam kunjungan tersebut, dilaksanakan pemantauan harga komoditas pangan pokok strategis di tingkat ritel. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka antisipasi lonjakan harga yang berpotensi terjadi pada Bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Menindaklanjuti hal tersebut dan sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga pangan di tingkat daerah, Dinperpa Kota Pekalongan mengadakan Gerakan Pangan Murah dan Penyaluran Subsidi Pangan yang berlangsung pada Bulan Februari dan Maret Tahun 2026. Selain itu, dilakukan juga pengujian keamanan dan mutu pada contoh pangan segar dengan hasil lebih hampir seluruh contoh pangan yang diujikan aman dari cemaran bahan tambahan pangan berbahaya berupa formalin, residu pestisida, dan borax.

5. Sidak Pasar bersama Komisi B Provinsi Jateng

Komisi B Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan di Pasar Grogolan Tanggal 9 Maret di Pasar Grogolan Dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan terkait Harga Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H Tahun 2026

6. Penanaman Jagung di Lahan Demplot Jagung Polres Pekalongan Kota

Acara ini dilaksanakan pada Sabtu, 7 Maret 2026, dihadiri langsung oleh Kapolres Pekalongan. Acara tersebut merupakan rangkaian dari penamaan jagung serentak kuartal 1 tahun 2026 secara nasional oleh Kapolri, Wamentan yang di pusatkan di Kabupaten Ogan Kemalailir, yang dimaskudkan dalam mendukung program swasembada jagung di Indonesia.

7. Gerakan Pangan Murah

Hari/tanggal : Jumat-Minggu, 13-15 Februari 2026

Tempat : GOR Jetayu

8. Gerakan Pangan Murah

Hari/tanggal : Jumat, 6 Maret 2026

Tempat : Lapangan Mataram

9. Gerakan Pangan Murah

Hari/tanggal : Rabu, 1 April 2026

Tempat : GOR Jetayu

10. Monitoing Stok LPG

Hari/tanggal : Selasa, 3 Februari 2026

Tempat : Pangkalan LPG di Pasirkratonkramat, Setono, Gamer

11. Pengawasan Barang Beredar

Hari/tanggal : Rabu-Kamis, 11-12 Februari 2026

Tempat : Pusat perbelanjaan, minimarket, dan pasar tradisional di Kota Pekalongan

12. Monitoring Penyuluh Pertanian dan Petani

Menindaklanjuti laporan dan monitoring Penyuluh Pertanian dan Petani, dimana ditemukan serangan hama dan bakteri (kresek) di wilayah Pekalongan Selatan. Hari ini Rabu 7 Januari 2026 dilaksanakan Gerdal di Kelompok Tani Sumber Urip dan Kelompok Tani Ijo Tani Kelurahan Kuripan Yosorejo.

Dinperpa memberikan bakterisida jenis "nordox" untuk menanggulangi serangan tersebut, karena penyebarannya cepat. Semoga dengan adanya Gerdal ini serangan dapat teratasi dan produktifitas padi tetap terjaga.

13. Penerapan teknologi Electrifying Agriculture

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mulai menyiapkan solusi jangka panjang melalui penerapan teknologi Electrifying Agriculture untuk menjamin kelancaran musim tanam, khususnya di wilayah Pekalongan Utara.

Melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Dinperpa), Pemkot Pekalongan berkolaborasi dengan PLN Area Pekalongan Kota merencanakan pemanfaatan pompa air berbasis energi listrik sebagai sumber irigasi utama sawah eks rob.

14. Penggunaan Transplanter Padi di Kota Pekalongan

Di Kota Pekalongan, penanaman padi dengan menggunakan mesin transplanter ini sudah cukup lama dilakukan, meskipun blm semua petani menggunakan dan masih memilih cara tanam manual menggunakan jasa penanam padi / buruh tandur.

Namun dalam perkembangannya, para buruh tandur ini sekarang semakin sedikit sehingga apabila petani ingin menggunakan jasanya harus memesan jauh-jauh hari dengan jadwal mereka yg cukup padat. Kondisi ini akhirnya memunculkan minat petani untuk memulai penanaman padi dengan menggunakan mesin transplanter ini.

15. Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Bina Marga Tahun 2026 Triwulan I

Rehabilitasi jalan berperan dalam kelancaran distribusi untuk pengendalian inflasi.

a. Rehabilitasi Decker Jalan Sumatra

Lokasi : Bendan Kergon, Pekalongan Barat

Realisasi Progres : Proses Pengadaan

b. Rehabilitasi Saluran Pematas Jalan Otto Iskandar di Nata

Lokasi : Kalibaros, Pekalongan Selatan

Realisasi Progres : Proses Pengadaan

16. Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap usaha coldstorage

Dengan adanya coldstorage harga ikan di Kota Pekalongan bisa stabil, karena saat hasil ikan melimpah ikan bisa disimpan di coldstorage.

17. Pemberian benih Nila

Benih ikan Nila dibagikan secara gratis ke masyarakat Kota Pekalongan dengan tujuan menstimulus kegiatan budidaya, meningkatkan kegiatan ekonomi dan menjaga ketersediaan dan harga ikan Nila. Pada Triwulan I Tahun 2026 benih yang diberikan ke masyarakat total

74.700 ekor dengan size 2-5 cm.

18. Pelayanan Pelelangan Ikan di TPI

Pelayanan Pelelangan Ikan di TPI setiap hari Senin s/d Minggu. Sehingga memudahkan nelayan menjual hasil ikan dan masyarakat mudah mendapatkan ikan dengan harga lebih murah.

19. Rapat Koordinasi minggu II bulan Januari 2026 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 12 Januari 2026

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Zoom

Hasil :

1. Pemerintah fokus menjaga inflasi di rentang 1,5% - 3,5%. Per November 2025, 10 provinsi masih berada di atas target tersebut, dengan inflasi tertinggi di Riau (4,27%).
2. Beras Medium menjadi tantangan besar dengan 47 dari 80 kabupaten/kota sampel memiliki harga di atas HET. Kab. Dogiyai mencatatkan harga tertinggi mencapai Rp20.000/kg.
3. Cabai Merah mencatat angka inflasi tahunan (YTD) yang sangat tinggi sebesar 69,59%, sedangkan Cabai Rawit justru mengalami deflasi YTD 10,39%, meski mulai merangkak naik di bulan Desember.
4. Terjadi penumpukan stok cabai di produsen (seperti Aceh Tengah) namun harga tetap tinggi di konsumen karena kendala logistik dan dampak bencana, memicu disparitas harga yang lebar.
5. Di wilayah Sumatera, kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi ada di Kab. Nias Utara (12,35%), sedangkan di Jawa berada di Kab. Bantul (5,59%), didominasi oleh komoditas daging ayam dan cabai.
6. Fenomena kenaikan harga daging ayam ras bersifat masif, terjadi di 258 daerah di seluruh Indonesia pada minggu ke-IV Desember 2025.
7. Pemerintah daerah diinstruksikan memperkuat kolaborasi dengan offtaker dan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk subsidi transportasi angkutan pangan.
8. BULOG dan dinas terkait diminta mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan menambah jaringan ritel di pasar tradisional guna memastikan harga sesuai HET.
9. Hingga 27 Desember 2025, telah diterbitkan 214.501 unit Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dengan progres tercepat di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

20. Rapat Koordinasi minggu III bulan Januari 2026 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 19 Januari 2026

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Tiga Negeri Setda Kota Pekalongan

Hasil :

- a. Secara historis, kelompok "Makanan, Minuman, dan Tembakau" selalu menjadi penyumbang inflasi dominan pada momen awal Ramadan. Untuk Maret 2025, kelompok ini diproyeksikan memberikan andil inflasi sebesar 0,37%. Komoditas yang diproyeksikan menjadi penyumbang inflasi utama antara lain Bawang Merah (andil 0,11%) dan Daging Ayam Ras (andil 0,03%), sementara Cabai Merah diproyeksikan menyumbang deflasi (andil -0,02%).
- b. Hingga minggu ketiga (M3) Januari 2026, harga rata-rata nasional beberapa komoditas strategis masih berada di atas harga acuan. Minyakita tercatat di atas HET (>Rp15.700/liter) di 393 Kabupaten/Kota. Sementara itu, harga rata-rata nasional Bawang Merah berada di level

Rp45.930/kg dan Daging Ayam Ras di level Rp40.252/kg, keduanya masih di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) masing-masing.

c. Per 15 Januari 2026, sejumlah komoditas bahan pokok penting (Bapokting) masih mencatat harga rata-rata nasional di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan (HA) yang ditetapkan pemerintah. Komoditas tersebut meliputi Beras (Medium & Premium di berbagai zona), Gula Pasir, Minyakita, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, serta Bawang Merah dan Putih, meskipun beberapa komoditas mengalami sedikit penurunan harga secara mingguan.

d. Realisasi distribusi Minyakita (DMO) menunjukkan tren penurunan yang signifikan sejak Juli 2025 hingga Januari 2026. Untuk mengatasi hal ini dan memastikan harga sesuai HET di tingkat konsumen, pemerintah mendorong optimalisasi distribusi melalui BUMN Pangan (Bulog dan ID FOOD) untuk disalurkan langsung ke pedagang pasar rakyat, memotong rantai distribusi perantara (D2).

e. Posisi stok beras nasional yang dikuasai Perum Bulog sangat aman, mencapai total lebih dari 3,3 juta ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan stok terbesar berada di Kanwil Jatim, Sulselbar, dan Jabar. Hal ini didukung oleh rekor realisasi pengadaan beras dalam negeri tahun 2025 yang mencapai lebih dari 3,4 juta ton.

f. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi kenaikan harga jelang Ramadan melalui tiga pendekatan: preemtif (koordinasi dan monitoring), preventif (pengecekan ketersediaan di lapangan dan pengawasan jalur distribusi), dan represif (penegakan hukum oleh Satgas Pangan Polri sebagai upaya terakhir, misalnya terhadap praktik bundling). Keberhasilan langkah ini membutuhkan dukungan aktif Pemerintah Daerah dalam koordinasi distribusi dan pengawasan di pasar rakyat.

g. Pemerintah secara konsisten menerapkan kebijakan intervensi penurunan harga tiket pesawat pada setiap periode peak season (Nataru, Lebaran/Angleb, dan Libur Sekolah) tahun 2024-2026 melalui berbagai stimulus seperti pemotongan Fuel Surcharge, PPN DTP 6%, serta reduksi biaya bandara (PJP2U & PJP4U), yang terbukti berhasil menurunkan rata-rata tarif bersih sebesar 15% hingga 19% pada periode Nataru 2025/2026 dan akan dilanjutkan kembali pada periode Lebaran 2026 untuk menekan inflasi.

h. Terdapat evaluasi terhadap implementasi kebijakan PBG "0 Rupiah" bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di mana masih ada 241 Kabupaten/Kota yang belum melaksanakannya. Selain itu, realisasi anggaran bidang perumahan dalam APBD 2025 menunjukkan ketimpangan yang signifikan, dengan beberapa daerah mencapai realisasi di atas 99% (seperti Kab. Kebumen), namun masih ada 33 daerah yang realisasinya tercatat 0% atau belum mengonfirmasi data.

21. Rapat Koordinasi minggu IV bulan Januari 2026 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 27 Januari 2026

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Zoom

Hasil :

a. Perkembangan inflasi nasional per Desember 2025, inflasi tahun ke tahun (year-on-year) sebesar 2,92%. Inflasi bulan Desember 2026 terhadap November 2026 (month-to-month) adalah 0,64%. Komoditas utama penyumbang inflasi year-on-year adalah emas perhiasan, cabai merah, ikan segar, cabai rawit, dan beras. Komoditas utama penyumbang inflasi month-to-month adalah cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, emas perhiasan, dan ikan segar.

b. Inflasi tertinggi di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota adalah Provinsi Aceh (6,71%),

Kabupaten Aceh Tengah (8,9%), Kota Gunungsitoli (10,84%). Batas rentang target inflasi adalah 1,5% s.d. 3,5%

c. Pada M4 Januari 2026, tercatat sebanyak 11 provinsi mengalami kenaikan IPH, 26 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, dan 1 provinsi stabil. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 11 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah daging ayam ras dan bawang merah. Kabupaten/Kota dengan perubahan IPH tertinggi adalah Kab. Bener Meriah di Provinsi Aceh dengan perubahan sebesar 10,70%.

d. Kota Pekalongan tidak termasuk dalam kota yang mengalami inflasi tertinggi maupun kenaikan IPH tertinggi. Artinya tingkat inflasi dan perubahan IPH di Kota Pekalongan masih dalam batas wajar.

e. Hasil pemantauan harga pangan strategis minggu terkini oleh Kantor Staf Presiden menunjukkan bahwa beberapa komoditas yang berada dalam status harga tidak aman dan dispersitas harga antar daerah tinggi adalah beras medium (zona 3), bawang merah, minyak, telur ayam ras, dan bawang putih.

22. Rapat Koordinasi minggu III bulan Februari 2026 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 18 Februari 2026

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Zoom

Hasil :

1. Fokus utama adalah mengatasi disparitas harga pangan strategis antar daerah, seperti beras medium (terutama di zona 3/Papua dan Maluku), cabai rawit merah, daging ayam ras, bawang putih, dan minyak goreng (Minyak).

2. Pemerintah menekankan perlunya kolaborasi antara pusat dan daerah, termasuk melibatkan Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan guna memastikan distribusi lancar dan mencegah kecurangan rantai dagang.

3. Terkait kenaikan harga cabai yang signifikan, pemerintah menyoroti pentingnya peran daerah sentra produksi dalam menjaga pasokan serta melakukan kerja sama perdagangan antar daerah.

4. Evaluasi mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap program strategis nasional 3 juta rumah.

5. Data menunjukkan progres pembebasan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) di berbagai daerah untuk mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

6. Pemerintah daerah didorong untuk segera melengkapi readiness criteria dan menginput data rumah tidak layak huni melalui aplikasi Sibaru agar program dapat berjalan cepat.

7. Rencanan dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Bapak Ahmad Haikal Hasan, mengenai potensi besar industri halal di pasar global. Beliau mendorong Indonesia untuk lebih proaktif dalam sertifikasi halal agar produk lokal dapat lebih kompetitif dan diterima di pasar internasional, belajar dari kesuksesan negara lain seperti China dan Brazil dalam menyasar pasar halal.

23. Rapat Koordinasi minggu IV bulan Februari 2026 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 23 Februari 2026

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Tiga Negeri Setda Kota Pekalongan

Hasil :

1. Topik-topik yang dibahas antara lain ; perkembangan pengendalian tingkat inflasi daerah, perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal, dan realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota TA 2025 dan TA 2026.
2. Perkembangan inflasi nasional per Januari 2026, inflasi Januari 2026 terhadap Januari 2025 sebesar 3,55%, inflasi Januari 2026 terhadap Desember 2025 sebesar -0,15%. Inflasi tertinggi pada tingkat Kabupaten/Kota dialami oleh Kota Gunungsitoli sebesar 8,68%. Kota Tegal termasuk dalam jajaran 10 kota dengan inflasi terendah, yaitu sebesar 3,08%.
3. Pertumbuhan ekonomi Indonesia per Triwulan IV tahun 2025 (Y-on-Y) sebesar 5,39%. Tingkat pertumbuhan tahunan PDB Indonesia peringkat 44 dari 185 negara di dunia. Peringkat 5 dari 11 negara ASEAN.
4. Perkembangan Perkada tentang pembebasan BPHTB dan pembebasan retribusi PBG untuk Program Tiga Juta Rumah bagi MBR, 509 daerah (terdiri dari 415 kabupaten, 93 kota, dan 1 provinsi DKI Jakarta) telah menerbitkan Perkada/Keputusan Kepala Daerah terkait Pembebasan Retribusi PBG dan Pembebasan BPHTB.
5. Sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal
 - a. Presiden Prabowo siapkan 1,2 juta Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM di 2025.
 - b. Program Sejuta Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) tahun 2025 yang diluncurkan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).
 - c. Alur sertifikasi halal melalui program Sehati lebih singkat daripada alur reguler.
 - d. Langkah ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
6. Strategi dalam menghadapi kebijakan anggaran tahun 2026 :
 - a. Efisiensi dan optimalisasi belanja daerah melalui percepatan realisasi APBD.
 - b. Inovasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak memberatkan masyarakat.
 - c. Pemanfaatan Program Strategis Nasional (PSN) sebagai peluang pertumbuhan daerah.
 - d. Mendorong peran swasta melalui kemudahan perizinan.

24. Rapat Koordinasi minggu I bulan Maret 2026 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 3 Maret 2026

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Zoom

Hasil :

1. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia mengalami inflasi pada Februari 2026 dengan tingkat bulanan (m-to-m) sebesar 0,68%, yang membalikkan kondisi deflasi pada bulan sebelumnya. Secara tahunan (y-on-y), angka inflasi melonjak cukup signifikan mencapai 4,76%, didorong oleh kenaikan tajam pada sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya (16,66%) serta sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar (16,19%). Meskipun kelompok transportasi mengalami sedikit deflasi secara bulanan, kontribusi utama terhadap inflasi bulan ini tetap didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,45%.
2. Berdasarkan data BPS per Februari 2026, kondisi inflasi tahunan (year-on-year) di Indonesia menunjukkan variasi yang cukup lebar antar wilayah, di mana Provinsi Aceh mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 6,94%, sementara Papua Pegunungan menjadi yang terendah dengan 0,63%. Pada tingkat kabupaten/kota, Aceh Tengah (8,44%) dan Gunungsitoli (7,75%) memimpin daftar wilayah dengan inflasi tertinggi, sedangkan angka terendah berada di Jayawijaya (0,63%) untuk kategori kabupaten dan Bandar Lampung (2,48%) untuk kategori kota. Sebagian besar wilayah masih berada di atas batas rentang target inflasi nasional yang

ditetapkan pada 1,5% hingga 3,5%.

3. Arahan Menteri Pertanian dalam pengendalian inflasi :

- Harga pangan tidak boleh naik dan harus tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- Menjaga harga di tingkat konsumen.
- Jangan mempermainkan harga ditengah situasi sekarang dan jangan mengambil untung yang tidak wajar.
- Peningkatan operasi pasar.
- Menjaga pasokan pangan.

4. Komoditas Cabai Rawit Merah mengalami kenaikan indeks tertinggi dimana sebanyak 85% Kab /Kota mengalami kenaikan harga melampaui HAP. Sedangkan komoditas Cabai Merah, walaupun mengalami kenaikan harga di 67 Kab /Kota, sebanyak 18% Kab /Kota yang harganya melampaui HAP

5. Secara keseluruhan , mayoritas komoditas kecuali Cabai Rawit) yang mengalami kenaikan IPH masih didominasi oleh wilayah yang harganya di bawah HAP, namun tetap perlu memberikan perhatian khusus pada komoditas Gula Pasir & Telur Ayam Ras karena wilayah yang mengalami kenaikan IPH, dengan harga diatas HAP (>50%). Komoditas Bawang Putih, Daging Ayam Ras juga perlu menjadi perhatian dengan kenaikan IPH di atas HAP sebesar 40%.

6. Kota Pekalongan mencatatkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 2,66% pada minggu keempat Februari, dengan komoditas utama yang mengalami kenaikan harga selama dua minggu berturut-turut adalah cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan langkah intervensi berupa operasi pasar dan gerakan menanam, namun upaya lain seperti inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, kerja sama antardaerah, bantuan transportasi dari APBD, maupun penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) belum dilaksanakan. Oleh karena itu, kesimpulan laporan menyarankan agar pemerintah daerah segera melakukan langkah stabilisasi harga yang lebih intensif guna menekan laju kenaikan harga pada ketiga komoditas tersebut.

25. Rapat Koordinasi minggu II bulan Maret 2026 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 9 Maret 2026

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Zoom

Hasil :

1. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia mengalami inflasi pada Februari 2026 dengan tingkat bulanan (m-to-m) sebesar 0,68%, yang membalikkan kondisi deflasi pada bulan sebelumnya. Secara tahunan (y-on-y), angka inflasi melonjak cukup signifikan mencapai 4,76%, didorong oleh kenaikan tajam pada sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya (16,66%) serta sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar (16,19%). Meskipun kelompok transportasi mengalami sedikit deflasi secara bulanan, kontribusi utama terhadap inflasi bulan ini tetap didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,45%.

2. Dalam rangka menyambut Libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah guna menjaga kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, diminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Mengantisipasi potensi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan selama Libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, serta terus berkoordinasi bersama seluruh jajaran Forkopimda;
- b. Menerapkan kesiapsiagaan dalam mendukung arus mudik lebaran;
- c. Melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi;

- d. Memastikan kesiapan penyelenggaraan kegiatan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah
3. Himbauan langkah-langkah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H/Tahun 2026 ;
 - a. Mengintensifkan Pemantauan dan Sinergi Pengawasan Bersama Satgas pangan dan aparat penegak hukum dalam mitigasi ketidakwajaran kenaikan harga komoditas pangan, gangguan distribusi, dan penimbunan, termasuk pada BBM dan LPG
 - b. Mengintensifkan Optimalisasi Intervensi Pasar Baik melalui operasi pasar murah/gerakan pangan murah/program Stabilisasi pasokan dan harga pangan untuk
 - c. Mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dengan melibatkan berbagai stakeholder
 - d. Memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi komoditas pangan terutama beras, aneka cabai, aneka bawang, daging, dan telur ayam ras—melalui pemantauan stok di gudang, pasar tradisional, pasar ritel modern, serta tingkat produsen, optimalisasi panen raya beras di daerah, dan dukungan kelancaran distribusi melalui alokasi subsidi ongkos angkut dari APBD

26. Rapat Koordinasi minggu III bulan Maret 2026 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 16 Maret 2026

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Tiga Negeri Setda Kota Pekalongan

Hasil :

1. Kota Pekalongan mengalami kenaikan harga telur ayam ras pada minggu ke-II Maret dengan perubahan IPH s/d M2 Maret terhadap Februari 2026 sebesar 0,28%
2. Kota Pekalongan mengalami kenaikan harga cabai rawit pada minggu ke-II Maret dengan perubahan IPH s/d M2 Maret terhadap Februari 2026 sebesar 21,92%
3. Berdasarkan historis lima tahun terakhir, terjadi inflasi di setiap momen Ramadan dan Idulfitri. Tingkat inflasi pada momen Ramadan dan Idulfitri tertinggi terjadi pada Maret 2025 sebesar 1,65 persen. Pada Februari 2026 yang bertepatan dengan awal Ramadan 2026 terjadi inflasi sebesar 0,68 persen.
4. Andil inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau terbesar terjadi pada April 2022 sebesar 0,46 persen. Begitu pula andil inflasi Kelompok Transportasi terbesar terjadi pada April 2022 sebesar 0,29 persen. Sementara itu, andil inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya terbesar terjadi pada Februari 2026 sebesar 0,19 persen. Periode Ramadan Periode Idulfitri
5. Pada M2 Maret 2026, tercatat sebanyak 25 provinsi mengalami kenaikan IPH dan 13 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 25 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai rawit, telur ayam ras, dan daging sapi.
6. Kota Pekalongan berada di urutan 5 dari Kabupaten/Kota dengan kenaikan IPH tertinggi di Pulau Jawa dengan perubahan IPH 2,31%. Komoditas yang menyumbang andil terbesar adalah daging sapi, cabai rawit, dan daging ayam ras.
7. Secara nasional, rata-rata harga telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras pada M2 Maret 2026 berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Pekalongan pada Triwulan I 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kota Pekalongan dan koordinasi dengan dengan TPID Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di Kota Pekalongan.
2. Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi surplus devisa pangan di masing-masing daerah.
3. Pentingnya adaptasi kebijakan dan aksi untuk menghadapi situasi yang tidak terduga.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Pekalongan pada Triwulan I 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan serta kelancaran distribusi yang
2. Mengidentifikasi Strategi Aksi mengantisipasi ketersediaan pangan dalam kondisi yang tidak ideal.
3. Melanjutkan dan meningkatkan koordinasi antar anggota TPID untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga.